

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN (PNPM-
MPd) DI DESA WALENRANG KECAMATAN WALENRANG
KABUPATEN LUWU**

ALVIANI WARDIANTY MUSU'

E011191092



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

Alviani Wardianty Musu' (E011191092). Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. XV + 105 Pages + 5 Gambar + 5 Tabel + 38 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Muhammad Yunus, MA dan Drs. Nelman Edy, M.Si

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah di harapkan mampu mengatasi hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan hal yang mendesak dan perlu penanganan yang serius. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah penyediaan modal melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan seperti yang ada di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan informan/narasumber serta observasi langsung yang dilakukan peneliti dan data sekunder yang bersumber dari dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu sudah efektif. Hal tersebut dikarenakan program tersebut telah memenuhi beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) meskipun belum optimal, ketepatan sasaran penerima program yakni kaum perempuan yang termasuk dalam golongan Rumah Tangga Miskin (RTM), ketepatan waktu penyetoran pinjaman di tiap bulannya, tercapainya tujuan program yakni kemudahan mengakses pendanaan usaha serta adanya perubahan nyata yang sudah dirasakan masyarakat seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian keluarga.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Alviani Wardianty Musu' (E011191092). The Effectiveness of the Women's Group Savings and Loans Program (SPP) PNPM Mandiri in Rural Areas (PNPM-MPd) in Walenrang Village, Walenrang District, Luwu Regency. XV + 105 Pages + 5 Figures + 5 Tables + 38 Bibliography + Appendices + Supervised by Dr. Muhammad Yunus, MA and Drs. Nelman Edy, M.Si

The problem of poverty is a problem that has existed for a long time as the population increases, especially in Indonesia. Therefore, the government is expected to be able to overcome this because poverty is an urgent matter and needs serious handling. One of the efforts made by the government in tackling poverty is providing capital through the PNPM Mandiri Rural Women's Savings and Loans Group (SPP) program, such as the one in Walenrang Village, Walenrang District, Luwu Regency.

This research is a descriptive qualitative research. This study aims to determine the effectiveness of the Women's Group Savings and Loans Program (SPP) PNPM Mandiri in Rural Areas (PNPM-MPd) in Walenrang Village, Walenrang District, Luwu Regency. The data used in this study uses primary data sourced from direct interviews with informants/source persons as well as direct observations by researchers and secondary data sourced from documents relevant to the research problem.

Based on the results of research on the Effectiveness of the Women's Group Savings and Loans Program (SPP) PNPM Mandiri in Rural Areas (PNPM-MPd) in Walenrang Village, Walenrang District, Luwu Regency, it can be concluded that the Women's Group Savings and Loans Program (SPP) PNPM Mandiri in Rural Areas (PNPM-MPd) in Walenrang Village, Walenrang District, Luwu Regency, it has been effective. This is because the program has met several indicators used in this study, namely the understanding of the Women's Group Savings and Loans (SPP) program even though it is not optimal, the accuracy of targeting program recipients namely women who are included in the Poor Households (RTM) group, the timeliness of depositing loans every month, the program objectives are achieved, namely the ease of accessing business funding and the existence of real changes that have been felt by the community such as increasing people's welfare through improving the family economy.

Keywords: Effectiveness, Program, Women's Group Savings and Loans



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviani Wardianty Musu'

NIM : E011191092

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa
Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,



ALVIANI WARDIANTY MUSU'



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alviani Wardianty Musu'
NIM : E011191092
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa
Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I,

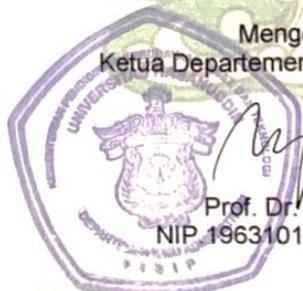
Pembimbing II,


Dr. Muhammad Yunus, MA
NIP. 19591030 198703 1 002


Drs. Nelman Edy, M.Si
NIP. 19610717 198702 1 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP. 19631015 1989031006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alviani Wardianty Musu'
NIM : E011191092
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa
Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Yunus, MA
Sekretaris Sidang : Drs. Nelman Edy, M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si
2. Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA

()
()
()
()

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah Rabbil Alamin...Segala puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas kehadiran **Allah SWT** yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul **“Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta tak lupa pula salam dan shalawat atas junjungan **Nabi Muhammad SAW** yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Selain itu, dalam pelaksanaan serta proses penyusunan skripsi ini masih ada kendala yang dihadapi, namun berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi dapat terselesaikan. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya terutama kedua orang tua tercinta Bapak **Muhammad Ansarulla Musu’ dan Ibu Husni** yang selalu mendoakan, mengingatkan, serta dukungan penuh kepada penulis serta kepada

adik-adikku **Al Aditya Wahyudi Musu'**, **Alghifari Wardiansa Musu'** dan **Azzahra Rezki Musu'** yang tidak hentinya memberikan masukan dan dukungan moral dan finansial kepada penulis.

Selain itu, baik pada saat menempuh perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi penulis juga mendapat dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Ole karena itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan ihklas kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan para staf.
2. **Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. **Dr. Muhammad Yunus, MA** selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi dan **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, pikiran, memberikan saran dan kritik membangun yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

6. **Prof. Dr. Badu, M.Si.** dan **Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi. Terima kasih banyak atas saran, masukan, dan kritikan yang sangat membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. **Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** terima kasih banyak atas didikan, ilmu, dan motivasi yang selama ini diberikan semoga apa yang penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
8. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi dan seluruh Staf di lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terima kasih atas seluruh bantuannya selama ini baik selama perkuliahan sampai saat ini.
9. Terima kasih kepada **Kepala UPK Kecamatan Walenrang Bapak Arman Gunawa, Sekretaris UPK Kecamatan Walenrang Ibu Nurganini, ST, Bendahara UPK Kecamatan Walenrang Ibu Ona, ST** serta **Seluruh Masyarakat Desa Walenrang** yang menerima bantuan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Terima kasih kepada Seluruh Jajaran **Pemerintah Kabupaten Luwu,** terkhusus **Pemerintah Desa Walenrang (Kepala Desa Walenrang beserta jajarannya)** atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

11. Terima kasih kepada segenap keluarga besar **HUMANIS FISIP UNHAS RELASI 2012, RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, FRAME 2016, LEADER 2017, LENTERA 2018** serta adik-adik **PENA 2020, LEGION 2021 dan OCEAN 2022** terima kasih atas pengalaman, pengetahuan, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis sejak awal masuk kuliah hingga saat ini. Terima kasih telah menjadikan penulis menjadi bagian dari keluarga ini.
12. Terima kasih kepada teman seperjuangan selama perkuliahan di kampus **MIRACLE 2019** yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih telah menjadi keluarga dan saudara selama kurang lebih 4 tahun ini dan semoga untuk selamanya. Terima kasih atas bantuan, perhatian, cerita dan pengalamannya selama kuliah. Penulis berharap, kekeluargaan dan persaudaraan ini tetap terjaga selamanya. Sukses untuk kita semua.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di **Kepengurusan HUMANIS FISIP UNHAS Periode 2020-2021 dan Periode 2021-2022**
14. Terima kasih kepada rekan seperjuangan **Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat HUMANIS FISIP UNHAS Periode 2020-2021 (Kak Dien, Kak Sandi, Kak Ino, Kak Reskinah, Kak Namirah, Amar, Besse dan Jupal)** yang telah bersama-sama melewati kepengurusan, terima kasih atas pengalaman, kerja sama dan kerja kerasnya selama di kepengurusan.
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan **Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat HUMANIS FISIP UNHAS**

Periode 2021-2022 (Amar, Amal, Nono, Besse, Halimah, Fauzan, Maycel, dan Nuni) yang telah bersama-sama melewati kepengurusan, terima kasih atas pengalaman, kerja sama dan kerja kerasnya selama di kepengurusan.

16. Terima kasih kepada teman-teman **Kampus Mengajar Angkatan 4 (Ipul, Alga, Gina dan Nisa)** yang telah bekerja sama selama 5 bulan untuk berbagi ilmu kepada adik-adik di **SDN 275 LALONG SELATAN**. Semoga sukses dan bisa meraih cita-cita.

17. Terima kasih kepada teman-teman **KKNT PERHUTANAN SOSIAL LUWU-PALOPO GEL.108** khususnya untuk **PS DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU (Indah, Farid, Rais, Alqi, Kino, Aulia, Astuti dan Fauziah)** yang sudah kebersamai penulis melewati masa-masa seru selama KKN. Terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama kurang lebih 2 bulan.

18. Terima kasih kepada **SAHABAT RUMAH (Ayu, Resti, Besse, Yuyu, Tasya, Syl, Lisa, Uta, Naurah, Dira dan Ima)** yang sudah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini yang sudah menjadi keluarga tak sedarah. Terima kasih karena selalu ada, terima kasih untuk segala support, terima kasih untuk cerita, nasehat dan terima kasih karena sudah menjadi **RUMAH untuk Penulis**.

19. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya **(Bhia, Puput, Arya, Pani, Nugrah, Tya, Sami,)** yang telah kebersamai penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih sudah memberikan support dan terima kasih atas

segala bantuan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan kripsi ini dengan baik.

21. Terima kasih kepada **Agung** yang selalu ada untuk penulis sejak 2017 sampai sekarang, terima kasih sudah menjadi orang yang paling mengerti dan sudah melalui suka, duka, canda dan tawa bersama. Semoga panjang umur dan apa yang diharapkan untuk masa depan bisa segera tercapai. Aamiin.

22. Terima kasih untuk diri sendiri karena sampai saat ini telah berjuang hingga bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih telah berusaha untuk melawan rasa malas dan ego selama menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doanya untuk penulis, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Penulis berharap semoga dengan adanya tulisan skripsi ini dapat bermanfaat diri sendiri dan bagi semua pihak yang membacanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Juni 2023

Alviani Wardianty Musu'

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Konsep Kebijakan	9
II. 2. Konsep Program	11
II.3 Konsep Efektivitas.....	13
II.4 Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri .	22
II.5 Konsep Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	27
II.6 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
III.1 Pendekatan Penelitian	35
III.2 Lokasi Penelitian	35
III.3 Unit Analisis	35
III.4 Sumber Data	36
III.5 Informan.....	36
III.6 Teknik Pengumpulan Data	37
III.7 Teknik Analisis Data.....	37
III.8 Fokus Penelitian.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
IV.1 Gambaran Umum Desa Walenrang	40

IV.2 Struktur Organisasi Desa Walenrang	43
IV.3 Visi dan Misi Desa Walenrang	44
IV.4 Gambaran Umum Kantor UPK PNPM Md Walenrang.....	45
IV.5 Struktur Organisasi Kantor UPK PNPM Md Walenrang.....	45
IV.6 Visi dan Misi Kantor UPK PNPM MPd Walenrang.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
V.1 Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan (Pnpm-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu	50
V.1.1 Pemahaman Program	50
V.1.2 Tepat Sasaran.....	54
V.1.3 Tepat Waktu	61
V.1.4 Tercapainya Tujuan.....	64
V.1.5 Perubahan Nyata	69
BAB VI PENUTUP	75
VI.1 Kesimpulan	75
VI.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar IV.1 Kantor Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.....	40
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Walenrang.....	43
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Kantor UPK Kecamatan Walenrang.....	45
Gambar V.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Tahun 2014- 2021.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.....	4
Tabel V.1 Persentase Pendapatan Responden Penerima Dana Simpan Pinam Kelompok Perempuan Desa Walenrang.....	52
Tabel V.2 Struktur Kelompok Mawar Program SPP/UEP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2023.....	59
Tabel V.3 Jumlah Penduduk Miskin di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu tahun 2019-2022.....	67
Tabel V.4 Perkembangan Kelompok Pnrm Mandiri Perdesaan Periode S/D 30 April 2023.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat miskin yang berjumlah 14,34 juta orang pada bulan maret 2022 Berdasarkan data sensus penduduk yang dikutip dalam (BPS 2022), jumlah masyarakat Indonesia yaitu 273.879.750 juta jiwa. Namun banyaknya jumlah masyarakat tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Berdasarkan data badan pusat statistik 2022, jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 14,34 juta orang hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah di harapkan mampu mengatasi hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan hal yang mendesak dan perlu penanganan yang serius guna mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Hal tersebut dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak yang dilakukan secara strategis dan inklusif.

Penyediaan modal merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah kemiskinan maupun pembangunan yang tertera dalam Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan nasional serta meningkatkan efektivitas pembangunan dan pencapaian lapangan kerja, pemerintah mengeluarkan program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM) mandiri pada tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program ini ditujukan pada desa-desa yang tertinggal. Tujuan dari PNPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) ini terdiri dari: PNPM-Mandiri Perdesaan, PNPM-Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program ini sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi. PNPM-Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota.

Salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah simpan pinjam perempuan (SPP) yang merupakan kegiatan pemberian dana bagi masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat miskin. Program SPP adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi perempuan dalam berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depgadri RI, 2007).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan mewawancarai ketua PNPM Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, dijelaskan bahwa tujuan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu untuk pengembangan potensi kegiatan-kegiatan simpan pinjam di perdesaan yang memudahkan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat

kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya program ini juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses pinjaman dan menghindari masyarakat berhubungan dengan rentenir. Dana yang di dipinjamkan kepada masyarakat miskin akan di kembalikan kepada PNPM dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Adapun mekanisme pembentukan kelompok dari program SPP ini yaitu harus terdiri atas 5-10 orang perempuan dalam satu kelompok. Masing-masing anggota diperkenankan meminjam dana sesuai ketentuan PNPM Mandiri di daerahnya.

Tabel I.1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen)		
	2020	2021	2022
Pangkep	13,96	14,28	13,92
Jeneponto	14,58	14,28	13,73
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22
Luwu	12,65	12,53	12,49
Enrekang	12,17	12,47	12,39
Kepulauan Selayar	12,48	12,45	12,24
Tana Toraja	12,10	12,27	12,18
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65
Bone	10,68	10,52	10,58
Maros	9,74	9,57	9,43
Bantaeng	8,95	9,41	9,07
Sinjai	9,00	8,84	8,80
Pinrang	8,86	8,81	8,79
SULAWESI SELATAN	8,72	8,78	8,63
Barru	8,26	8,68	8,40
Takalar	8,44	8,25	8,25
Palopo	7,85	8,14	7,78
Soppeng	7,59	7,53	7,49
Bulukumba	7,10	7,43	7,39
Gowa	7,38	7,54	7,36
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81
Wajo	6,95	6,46	6,57
Pare Pare	5,44	5,40	5,41
Sidrap	5,05	5,04	5,11
Makassar	4,54	4,82	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu masih tinggi sehingga Kabupaten Luwu termasuk salah satu Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2022 tentang tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu berada di peringkat ke empat (4) setelah Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Luwu Utara. Salah satu usaha pemerintah setempat untuk terus berusaha menanggulangi kemiskinan ini adalah dengan mengembangkan berbagai program salah satunya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu desa di Kabupaten Luwu yang memperoleh program pemerintah PNPM Mandiri yaitu Desa Walenrang. Banyaknya masyarakat miskin di Desa Walenrang dan ketertinggalan pembangunan perdesaan sehingga Desa Walenrang termasuk salah satu desa yang menjalankan program PNMP Mandiri oleh pemerintah. Di desa Walenrang sendiri ada banyak masyarakat yang memperoleh bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNMP Mandiri Perdesaan sampai saat ini berjumlah 24 kelompok periode sampai dengan 30 april 2023.

Dalam pemberian pinjaman, pihak PNPM memberikan pinjaman kepada masyarakat yang telah memenuhi administrasi, kemudian kelompok tersebut mengajukan proposal peminjaman dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sebelum pencairan harus dilakukan tinjauan lapangan terlebih dahulu untuk melakukan studi kelayakan usaha.

Pelaksanaan program ini erat kaitannya dengan efektivitas, dimana untuk mengetahui suatu program dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan target atau sasaran dari program tersebut. Komaruddin (2005:294) mengemukakan bahwa "efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan

tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dahulu”.

Sama halnya dengan program pemerintah PNPM Mandiri di Desa Walenrang Kabupaten Luwu, untuk melihat apakah program tersebut efektif dalam pelaksanaannya, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian tujuan program tersebut. Sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah untuk membantu penanggulangan kemiskinan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri selama ini bukan berarti tidak memiliki kendala atau masalah yang dihadapi khususnya di Desa Walenrang Kabupaten Luwu. Dalam pelaksanaan suatu program, kendala merupakan suatu hal yang pasti dilihat dari banyaknya asumsi yang mengatakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri ini masih kurang baik dan kurang efektif terutama dalam hal pengembalian, syarat agunan serta oknum penerima.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan banyak masyarakat miskin yang melakukan pinjaman namun terkendala pada proses pengembalian. Dimana dana yang telah dipinjamkan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, namun ada kelompok yang menunggak sehingga tidak lagi diberikan pinjaman selanjutnya. Masalah lainnya yaitu setiap anggota yang akan meminjam harus memiliki jaminan yang tentunya menyulitkan bagi masyarakat miskin untuk mengajukan pinjaman. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan khusus dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa adanya syarat agunan. Adapun masalah lainnya yang ditemukan oleh penulis ialah interpretasi yang keliru dari para penerima bantuan dana SPP dimana

dana pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok SPP mereka gunakan untuk keperluan konsumtif atau biaya pendidikan anak. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari program ini, bagaimana mungkin ekonomi rumah tangga masyarakat miskin bisa berkembang, jika dana pinjaman digunakan tidak pada semestinya.

Adanya berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri ini khususnya di Desa Walenrang Kabupaten Luwu. Apabila ada hal-hal yang ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan, maka melalui penelitian ini, pelaksanaan program dapat menjadikan evaluasi dan memaksimalkan pelaksanaan program baik yang sedang berjalan maupun program lain yang akan datang agar tujuan dari program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis yang berguna dalam memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai teori efektivitas dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam memberikan solusi serta masukan kepada instansi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan

II.1.1 Pengertian Kebijakan

Ada berbagai macam definisi yang dibuat oleh para ahli yang menjelaskan tentang arti kebijakan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011) “istila kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Kebijakan juga dijelaskan oleh Thomas Dye (Edi Suharto, 2005:44) yang mendefinisikan kebijakan sebagai suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan menurut Charles O.Jones, istila kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Sedangkan ahli lain seperti halnya W.I.Jenkins dalam Wahab (2014) berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Menurut Islamy (2000) dalam bukunya *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, pengertian “kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

II. 1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Eugene Bardach dalam Leo Agustino adalah cukup membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien (Agustino 2014:138).

Adapun menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustino 2014:139).

Sedangkan menurut Van Mater dan Van Horn dalam Leo Agustino, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2014:139).

Dari tiga definisi di atas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan menyangkut pada tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

II. 2. Konsep Program

II. 2.1 Pengertian Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “program” artinya rancangan mengenai asas serta usaha yang dilakukan.

Menurut Arikunto (2014:4) menjelaskan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan tidak hanya satu kali namun

berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu kali namun berkesinambungan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Lebih lanjut Arikunto mengatakan bahwa ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Karding (2008:33) menjelaskan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang dilakukan. Apabila "program" ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu kelompok organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Selanjutnya pengertian program juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimana disebutkan bahwa pengertian "program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

II.3 Konsep Efektivitas

II.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Dunn (2005), efektivitas (*effectiveness*) adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Mahmudi (2005:92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Pasolong (2012:51), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasar tercapai karena adanya proses kegiatan.

Adapun menurut Robbins dalam bukunya yang berjudul *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi* (1994: 85), keefektifan organisasi dapat didefinisikan

sebagai “tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka Panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.”

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Menurut Steers (dalam Sutrisno 2010), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

II.3.2 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbins dalam bukunya yang berjudul *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi* (1994: 58 – 75), ada empat pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan suatu organisasi yaitu antara lain:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*) ketimbang caranya (*means*). Agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut.

2. Pendekatan Sistem

Dalam pendekatan sistem, tujuan akhir tidak diabaikan, namun hanya dipandang sebagai satu elemen di dalam kumpulan kriteria yang lebih kompleks. Model-model sistem menekankan kriteria yang akan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang dari organisasi seperti kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya, mempertahankan dirinya secara internal sebagai sebuah organisme sosial, dan berintegrasi secara berhasil dengan lingkungan eksteranya. Jadi pendekatan sistem berfokus bukan pada tujuan akhir tertentu tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir.

3. Pendekatan Konstituesi – Strategis

Pendekatan ini mengemukakan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang berada dalam lingkungan organisasi yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan konstituensi-strategis mengasumsikan bahwa para manajer mengejar sejumlah tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih mewakili respons terhadap kelompok-kelompok berkepentingan yang mengendalikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk kelangsungan hidupnya. Tida ada tujuan atau kumpulan tujuan ya ng dipilih oleh manajemen yang bebas nilai.

4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing

Pendekatan ini lebih menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang semakin tinggi maka terdapat tiga kumpulan dasar dalam menilai suatu keefektifan organisasi

yaitu pertama fleksibilitas versus control, kedua pengembangan dan kesejahteraan manusia versus organisasi, ketiga cara versus tujuan organisasi.

Pendekatan efektivitas juga dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini (2009) yang dikutip oleh Maun (2020), yang menyebutkan bahwa ada tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dari kondisi Kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

II.3.3 Indikator Efektivitas

Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi yang salah satunya di jelaskan oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) efektivitas dapat diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap juga perencanaan yang matang
4. Tersedianya sarana dan prasarana
5. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Selanjutnya menurut Campbell J.P. dalam Sutrisno (2010) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Efektivitas Keseluruhan. Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuannya.
2. Kualitas. Kualitas atau jasa produk utama yang dihasilkan oleh organisasi

3. Produktivitas. Kuantitas atau volume produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh organisasi.
4. Kesiapsiagaan. Penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
5. Efisiensi. Suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi itu.
6. Laba. Penghasilan atas penanaman modal yang digunakan untuk menjalankan organisasi dilihat dari segi pemilik.
7. Pertumbuhan. Penambahan hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas pabrik laba, dan penemuan baru.
8. Pemanfaatan Lingkungan. Sejauh mana organisasi dengan sukses berinteraksi dengan lingkungannya.
9. Stabilitas. Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
10. Perputaran atau Keluar Masuknya Karyawan. Frekuensi atau banyaknya pemberhentian secara sukarela
11. Absenteisme. Banyaknya kemangkiran kerja.
12. Kecelakaan. Banyaknya kecelakaan dalam pekerjaan.
13. Semangat Kerja. Kecenderungan anggota organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan.
14. Motivasi. Kekuatan kecenderungan seseorang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan.

15. Kepuasan. Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya.
16. Internalisasi Tujuan Organisasi. Diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit dalam organisasi.
17. Konflik Kohesi. Dimensi kutub kohesi, yang menunjukkan satu sama lain saling suka, kerja sama, berkomunikasi penuh dan terbuka, dan terkoordinasikan.
18. Fleksibilitas Adaptasi. Kemampuan suatu organisasi mengubah standar prosedur operasi dalam menanggapi tantangan lingkungan.
19. Penilaian Pihak Luar. Penilaian terhadap organisasi atau unit-unit organisasi dari seseorang atau lembaga untuk menaruh kepentingan.
20. Iklim. Keadaan lingkungan di dalam organisasi.
21. Kualitas Kehidupan Kerja. Kualitas perhubungan karyawan dengan lingkungan kerjanya.

Sementara itu Siagian (2006) juga mengemukakan beberapa kriteria untuk mencapai tujuan yang efektif, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sementara itu menurut Budiani (2007:53) efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Adapun menurut Sutrisno (2007: 125 – 126), dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program, dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
2. Tepat sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu, dilihat dari sejauh mana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaannya.

4. Tercapainya tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata, diukur dengan melalui sejauh mana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

II.4 Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

II.4.1 Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program ini merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dinilai berhasil dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, serta menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program ini dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Setiana (2007:79), istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.

Pengertian PNPM mandiri dijelaskan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri (2007: 17-18) yang artinya adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme

dan prosedur program, penyediaan pendamping dan pendanaan stimulan untuk mendorong Prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan, terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar, dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. Adapun tujuan umum dari PNPM Mandiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam PNPM Mandiri (Pedoman umum PNPM Mandiri, 2007:18), yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas kelompok adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dalam pengellaan pembangunan.
2. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan regular.
3. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam local dengan mempertimbangkan kelestariannya.

4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan khususnya pemerintah desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
6. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
7. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
8. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

II.4.2 Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) menekankan prinsip-prinsip dasar yang juga dijelaskan dalam Pedoman Umum PNPM-Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi. Dalam melaksanakan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6. Kesenjangan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan Kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

II.4.3 Komponen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Ada beberapa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program yang dijelaskan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri (2007) yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

2. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai Sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

II.5 Konsep Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

II.5.1 Pengertian Simpan Pinjam Perempuan

Menurut Rudianto (2010:51) simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggota, untuk kemudian dipinjamkan Kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

Dalam penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) IV PNPM-MP (2007: 58) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, arisan dan kegiatan lain yang minimal satu tahun berdiri serta mempunyai kepengurusan yang jelas. Adapun tujuan dan ketentuan SPP sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
4. Ketentuan Dasar
 - a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
 - b. Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan

mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

- d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sesuai kebijakan yang dijelaskan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dana yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam adalah pinjaman yang harus dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya (dana simpan pinjam bergulir). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan kegiatan usaha
- b. Memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan
- d. Menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok perempuan di pedesaan.

II.5.2 Mekanisme Dasar-Dasar Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dalam penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) IV PNPM-MP mekanisme dasar-dasar pengelolaan kegiatan SPP dalam penjelasannya sebagai berikut:

a. Musyawarah Antar Desa (MAD)

Dalam MAD, sosialisasi dilakukan dalam ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan manfaatnya.

b. Musyawarah Desa (MusDes)

Musyawarah Desa dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat Desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan proses lanjutan

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota.
2. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok.
3. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan.
4. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan peta RTM dan rekap kebutuhan pemanfaat.
5. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

- a. Penentuan Usulan Desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Penentuan usulan ini melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan ini melalui MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa.
- b. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut:
 1. Sekilas kondisi kelompok SPP
 2. Gambaran Usaha dan Rencana yang menjelaskan :
 - a. Kondisi Anggota
 - b. Kondisi Permodalan
 - c. Kualitas Pinjaman
 - d. Kondisi Operasional
 3. Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang.
 4. Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana.
 5. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta RTM (Rumah Tangga Miskin)

Sasaran dalam pelaksanaan program simpan pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM MPd yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha melalui kelompok simpan pinjam perempuan. Adapun kriteria kelompok perempuan yang dapat menerima pinjaman dana yaitu:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, saling mengenal satu sama lain, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjam yang telah disepakati
3. Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana

Mengacu pada PTO PNPM-MP, pelaksanaan simpan pinjam perempuan memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan kegiatan usulan simpan pinjam perempuan (proposal) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan yang telah ada dimasyarakat.
2. Verifikasi usulan proposal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi(TV),di dampingi UPK Kecamatan dan lembaga BKAD serta BP-UPK bermusyawarah untuk menilai kelayakan proposal yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
 - b) Persyaratan Kelompok
 - c) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :
 - 1) Permodalan
 - 2) Kualitas Pinjaman
 - 3) Administrasi dan Pengelolaan
 - 4) Pendapatan
 - 5) Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
 - d) Penilaian Khusus Rencana Kegiatan

3. Proposal yang layak akan disetujui dan akan mendapatkan pendanaan, dana pinjaman dengan tidak melebihi pengajuan di proposal.
4. Pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ke kelompok disaksikan oleh Kepala Desa atau perangkat desa yang mewakilinya.

II.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar atau landasan dalam mengembangkan konsep dan teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hal penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125-126) karena dinilai cocok dan relevan dengan fokus penelitian dan juga berkaitan dengan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang. Teori ini menjelaskan bahwa ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program dalam sebuah organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Dalam teori tersebut nantinya dijadikan sebagai alat atau indikator dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Adapun bentuk dari kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir

